



## Romantisme Pendidikan Pesantren di Era Milenial dan Revolusi Industri 4.0

Abas<sup>1</sup>, Hilyatul Auliya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>MAN 5 Cirebon, <sup>2</sup>STAIMA Cirebon

[kent\\_abas@yahoo.com](mailto:kent_abas@yahoo.com), [hilyaliya@gmail.com](mailto:hilyaliya@gmail.com)

Diserahkan tanggal 25 April 2023 | Diterima tanggal 25 Mei 2023 | Diterbitkan tanggal 28 Mei 2023

### Abstract:

*Pesantren, which is the main pillar of the archipelago's original education, is currently often considered a conservative and outdated education, especially in this millennial era. Technological advances in the era of the industrial revolution 4.0, as well as massive globalization and westernization are both challenges and opportunities for kiai and santri in spreading friendly and universal da'wah. The research method used by the author is library research. The author collects various library data to obtain answers to the questions asked by the author. Through the data that the author has collected, the author finds various facts. First, the millennial era can be called the post-modern era. This era is defined by some experts as the era of back to spiritual and moral or back to religion. Meanwhile, the Industrial Revolution 4.0 is a comprehensive transformation of all aspects of production in industry through the merger of digital and internet technology with conventional industries. In this era, information can be spread quickly because all entities are always connected to each other. Second, pesantren experience various dynamics, both social and economic. Pesantren, which is the blue print of Indonesia's original education since hundreds of years ago, does not necessarily make it a static and backward educational institution. In its development, pesantrens do not only teach the yellow book. Nowadays, pesantrens have become an Islamic educational institution that is inclusive and keeps up with the times. Pesantren strives to always open a space for dialog by adopting new values that are more relevant and bring maslahat as well as more perfect in maintaining the existence of pesantren. This is in line with the Al-Mubafadatu 'ala al-Qadimi al-Shalih wa al-Akhd bi al-Jadid al-Aslah rule.*

**Keywords:** education, pesantren, millennial, industrial revolution 4.0

### Abstrak :

*Pesantren yang merupakan pilar utama pendidikan asli nusantara, saat ini justru kerap dianggap sebagai pendidikan yang kolot dan ketinggalan zaman, terutama pada era milenial ini. Kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, serta masifnya globalisasi dan westernisasi menjadi tantangan sekaligus peluang untuk para kiai dan santri dalam menyebarkan dakwah yang ramah dan universal. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah library research. Penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis. Melalui data yang telah penulis kumpulkan, penulis menemukan berbagai fakta. Pertama, era milenial dapat disebut era post-modern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era back to spiritual and moral atau back to religion. Sementara Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Pada era tersebut, sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat karena seluruh entitasnya selalu terhubung satu sama lain. Kedua, pesantren mengalami berbagai dinamika, baik sosial maupun ekonomi. Pesantren yang merupakan blue print pendidikan asli Indonesia sejak ratusan tahun lalu tidak lantas menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang jumud dan terbelakang. Pada perkembangannya, pesantren tidak hanya mengajarkan kitab kuning semata. Pesantren pada saat ini justru menjadi lembaga pendidikan Islam yang inklusif dan mengikuti perkembangan zaman. Pesantren berupaya untuk selalu membuka ruang dialog dengan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih relevan dan membawa maslahat juga lebih sempurna dalam menjaga eksistensi pesantren. Hal tersebut selaras dengan kaidah Al-Mubafadatu 'ala al-Qadimi al-Shalih wa al-Akhd bi al-Jadid al-Aslah.*

**Kata Kunci:** pendidikan, pesantren, milenial, revolusi industri 4.0.

Copyright © 2023, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam, termasuk pesantren memiliki tiga tugas pokok. *Pertama*, mengajarkan ilmu pengetahuan Islam. *Kedua*, memelihara tradisi keislaman. *Ketiga*, mencetak kader-kader ulama. (Burhanuddin, 2006) (Maliki, 2023) Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam di nusantara yang memiliki peran krusial dalam membentuk umat dan peradaban di Indonesia sudah dapat dipastikan telah menjadi pusat dalam melaksanakan ketiga tugas pokok tersebut. (Auliya et al., 2019) Dalam hal ini, pesantren dinilai sebagai pusat pembentukan pemikiran Islam di Indonesia, bahkan sebagai sumber terbentuknya peradaban pendidikan Islam di Indonesia. Ia dianggap sebagai institusi pendidikan tertua dan merupakan produk budaya keilmuan yang lahir dari rahim bumi Nusantara jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cikal bakal keberadaan pesantren diyakini sudah ada sejak abad 13 Masehi seiring masa penyebaran Islam di Nusantara. (Maliki, 2023) (Maliki et al., 2022) Pesantren tidak hanya fokus pada sistem pendidikan dan penguatan sumber daya manusia semata. Jauh daripada itu, pesantren memiliki fungsi sentral untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sekaligus menjadi benteng keutuhan bangsa dan negara. Hal tersebut mempertegas besar dan luasnya peran pesantren bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagaimana tersurat dalam tridharma pondok pesantren. *Pertama*, keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. *Kedua*, pengembangan keilmuan yang bermanfaat. *Ketiga*, pengabdian terhadap agama, negara, dan masyarakat. (Suharto, 2016)

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, teknologi informasi menjadi basis dalam kehidupan manusia. Pada zaman ini, dikenal istilah “milenial” yang identik dengan zaman teknologi digital. Perkembangan internet dan teknologi digital masif sebagai tulang punggung gerakan manusia dan mesin serta konektivitasnya. Revolusi ini akhirnya mengubah perspektif seseorang dalam menjalani kehidupan modern dan canggih. Dalam hal ini, pesantren yang bersifat tradisional harus menyesuaikan diri agar tetap relevan antara pola pendidikan di pesantren dan perkembangan zaman.

## PEMBAHASAN

### 1. Era Milenial dan Revolusi Industri 4.0

#### a. Era Milenial

Istilah millennial berasal dari Bahasa Inggris. Millennium atau millennia yang berarti masa seribu tahun. Millennial selanjutnya menjadi sebutan untuk sebuah masa yang terjadi setelah era global, atau era modern. Oleh karena itu, era millennial dapat pula disebut era post-modern. Era ini oleh sebagian pakar diartikan sebagai era *back to spiritual and moral* atau *back to religion*, yaitu masa kembali kepada ajaran spiritual, moral dan agama.

Jika dilihat menggunakan teori sosiologi generasi, (Pilcher, 1994) kaum milenial adalah mereka yang dilahirkan pada sekitar tahun 1981-1995 atau disebut generasi Y. Setelah generasi Y, disusul dengan generasi Z yang dilahirkan pada tahun 1996-2010. Teori generasi lahir dari kondisi negara-negara maju secara teknologi, seperti Amerika Serikat. Setelah tahun 2010, penyebaran teknologi informasi dan komunikasi hampir merata di seluruh dunia. Bagi generasi yang lahir pada era ledakan teknologi digital ini, mereka disebut sebagai generasi alpha (alfa). (Nuris, 2019) (Maliki et al., 2022)

Generasi alfa adalah anak-anak yang lahir dari generasi milenial. Mereka tumbuh berinteraksi dengan ragam teknologi Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) dan robot yang layaknya manusia. Mereka akan bermain dengan mainan yang mampu merespon perintah dan juga mampu menunjukkan kecerdasan emosional. Oleh sebab itu, istilah era milenial kerap bersinggungan dengan istilah revolusi industri 4.0.

b. Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi industri terjadi empat kali. Revolusi industri pertama terjadi pada tahun 1784 di Inggris. Revolusi industri pertama ini ditandai dengan penemuan mesin uap dan mekanisasi sudah mulai menggantikan pekerjaan yang biasa dilakukan oleh manusia. Revolusi industri kedua terjadi pada akhir abad 19 yang ditandai dengan kemunculan mesin-mesin produksi yang ditenagai oleh listrik dan digunakan untuk kegiatan produksi secara masal. Revolusi industri ketiga ditandai dengan mulainya penggunaan teknologi berupa komputer pada tahun 1970. (Prasetyo & Sutopo, 2018)

Perkembangan pesat dari teknologi sensor, interkoneksi, dan analisis data memunculkan gagasan untuk mengintegrasikan seluruh kecanggihan teknologi tersebut ke dalam berbagai bidang industri. Gagasan tersebut merupakan tanda dari munculnya revolusi industri 4.0 pada saat ini. Revolusi industri yang keempat ini merupakan fenomena yang unik jika dibandingkan dengan tiga revolusi industri sebelumnya, karena pada saat itu revolusi industri 4.0 diumumkan secara apriori. (Prasetyo & Sutopo, 2018)

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Pada era tersebut, sebuah informasi dapat tersebar dengan cepat karena seluruh entitasnya selalu terhubung satu sama lain. Penjelasan lain dari industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System (teknologi yang menghubungkan antara dunia nyata dan dunia maya) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Melalui IoT, CPS mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara real time, termasuk dengan manusia. IoS merupakan semua aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan, baik secara internal maupun antar organisasi. (Prasetyo & Sutopo, 2018)

Istilah Revolusi Industri 4.0 lahir di Jerman pada tahun 2011. Jerman memiliki kepentingan besar karena revolusi industri 4.0 menjadi bagian dari kebijakan rencana pembangunannya yang disebut High-Tech Strategy 2020. Beberapa negara lain juga turut mewujudkan konsep revolusi 4.0, namun dengan menggunakan istilah lain, seperti Industrial Internet of Things, Smart Industry, Smart Factories, atau Advanced Manufacturing. Varian istilah tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Hal tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai bidang. (Prasetyo & Sutopo, 2018)

## 2. Dinamika Pesantren dari Masa ke Masa

a. Pra Kemerdekaan

Pesantren merupakan pilar utama penopang pendidikan di nusantara. Alwi Shihab menegaskan bahwa Syaikh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik (W. 1419 H.) merupakan orang pertama yang membangun pesantren sebagai tempat mendidik dan menggembleng para santri. Tujuannya, agar para santri menjadi juru dakwah yang mahir sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat luas. Gayung bersambut, usaha Sunan Gresik menemukan momentum seiring dengan mulai runtuhnya singgasana kekuasaan Majapahit (1293-1478 M), Islam pun berkembang demikian pesat, khususnya di daerah-daerah pesisir yang kebetulan menjadi pusat-pusat perdagangan antar daerah, bahkan antar negara.

Melalui hasil penelusuran sejarah pula, ditemukan sejumlah bukti kuat yang menunjukkan bahwa cikal bakal pendirian pesantren pada periode awal terdapat di daerah-daerah sepanjang pantai utara Jawa, seperti Giri (Gresik), Ampel Denta (Surabaya), Bonang (Tuban), Kudus, Lasem, Cirebon, dan sebagainya. Kota-kota tersebut pada waktu itu merupakan kota kosmopolitan yang menjadi jalur penghubung perdagangan dunia, sekaligus sebagai tempat persinggahan para pedagang dan mubaligh Islam yang datang dari Jazirah Arabia seperti Hadramaut, Persia, Irak, dan lain sebagainya. Hasil survei pemerintah Belanda yang pertama (1819 M), juga menyebutkan bahwa lembaga pendidikan Islam tradisional terdapat di beberapa kabupaten yang terletak di daerah pesisir, seperti Cirebon, Semarang, Kendal, Demak, Jepara, Surabaya, Gresik, Bawean, Sumenep, Pamekasan, dan Besuki. (Sihab, 2002) (Haedari, et.al, 2004)

Seiring dengan pengembangan pesantren di wilayah pesisir, pengaruh ekologi laut dan psikologis para juru dakwah yang juga berprofesi sebagai pedagang, menjadikan pesantren pada periode awal ini cenderung menampilkan corak kosmopolit, adaptif, dan cepat menerima nilai-nilai baru. Dalam hal ini, sublimasi terhadap tradisi lama dan budaya lokal, seperti mengadopsi bentuk bangunan ibadah dan asrama, dan atau menggunakan metode pembelajaran mandala (bandongan) adalah beberapa hal yang membuktikan akomodasi budaya yang dilakukan pesantren nampak kreatif dan toleran. Oleh karena itu, wajar apabila di pusat-pusat perdagangan itu juga tumbuh komunitas masyarakat yang menghargai pluralisme serta toleran terhadap hadirnya para pendatang baru yang tidak seiman, seperti etnis cina (Tionghoa) dan lain sebagainya. (Haedari, et.al, 2004)

Periodisasi sejarah pesantren di pedalaman menampilkan corak yang berbeda dengan pesantren urban yang berada di pesisir. Komunitas pedalaman menuntut formula-formula yang berbeda dengan masyarakat pesisir dalam pengembangan sistem kepercayaan maupun praktik-praktik ritual peribadatan. Eksistensi pesantren dihadapkan pada situasi maupun kondisi lingkungan masyarakat baru yang mayoritas bercocok tanam (agraris) dan sangat kuat memegang ajaran tradisi masyarakatnya. Akibatnya, jika masyarakat urban di kota-kota pesisir lebih mudah mengadopsi agama yang universal dan abstrak, penduduk pedalaman, sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra dalam Islam Nusantara, lebih kukuh mengikatkan diri kepada arwah lokal dan kekuatan alam. (Azra, 2002)

#### b. Pasca Kemerdekaan

Tokoh pertama dalam kalangan pegawai pemerintah kolonial Belanda yang secara penuh bekerja untuk pendidikan masyarakat non-Eropa adalah Inspektur Pendidikan Pribumi, yakni J.A. van der Chijs. Pada tahun 1865, setahun setelah menjabat sebagai Inspektur Pendidikan, ia menolak untuk menyesuaikan pendidikan Islam yang sudah ada (baca: pesantren) karena alasan teknis pendidikan, yaitu membaca teks Arab yang dihafal tanpa dipahami maknanya. Sistem pendidikan umum di Indonesia tidak timbul dari penyesuaian dengan sistem pendidikan Islam tradisional (baca: pesantren), melainkan sistem pendidikan Islam yang akhirnya menyesuaikan diri dan masuk ke dalam sistem pendidikan umum. (Steenbrink, 1986)

Menjelang memasuki abad ke-19, sekolah-sekolah tipe Barat (sekolah Kolonial) mulai dibuka dan dikembangkan oleh orang-orang Belanda. Tujuannya adalah untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonial Belanda dan menandingi pengaruh pesantren yang sudah berkiprah sejak lama dalam dunia pendidikan di Indonesia. (Zamakhsyari Dhofier, 2011) (Maliki et al., 2022) (Maliki, 2023) Hal ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar bagi pendidikan pesantren. Bagi para eksponen pendidikan Belanda, seperti Sutan Takdir Alisjahbana, sistem pendidikan pesantren harus ditinggalkan, atau setidaknya ditransformasikan sehingga mampu mengantarkan kaum Muslim menuju gerbang rasionalitas dan kemajuan. Menurut Sutan Takdir, apabila pesantren dipertahankan, maka itu

artinya mempertahankan keterbelakangan dan kejumudan kaum Muslim. (Nurcholish Madjid, 1997)

Tantangan yang lebih besar dari berdirinya sekolah Belanda yakni datang dari kaum reformis atau modernis Muslim. Gerakan reformis Muslim berpendapat bahwa untuk menjawab tantangan kolonialisme dan Kristen diperlukan reformasi sistem pendidikan Islam. Dalam konteks inilah muncul dua bentuk kelembagaan pendidikan modern Islam. Pertama, sekolah-sekolah umum model Belanda namun diberikan muatan pengajaran agama Islam. Misalnya, Sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Abdullah Ahmad di Padang pada tahun 1909, dan sekolah umum model Belanda yang didirikan oleh organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah. Kedua, madrasah-madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda. Misalnya, Sekolah Diniyah Zainuddin Labay al-Yunusi, Sumatera Thawalib, atau madrasah yang didirikan Jami'atul al-Khairiyah dan madrasah yang didirikan oleh organisasi al-Irsyad. (Nurcholish Madjid, 1997)

Kaum Muslim saat itu semakin memiliki banyak pilihan dalam mencari pendidikan untuk anak-anak. Ada sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah Islam (seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan organisasi Muslim lainnya), madrasah, dan pesantren. Kesulitan ekonomi yang dihadapi rakyat Indonesia pada tahun 1950-an dan awal 1960-an membuat pendidikan pesantren yang mematok biaya sangat murah tersebut menjadi alternatif terbaik bagi kalangan Muslim miskin, terutama warga pedalaman di Pulau Jawa.

Mirip pesantren pada masa kolonial, pesantren pada masa pasca kemerdekaan juga memberikan respon terhadap perkembangan sistem pendidikan umum yang disebarkan pemerintah dengan memperluas cakupan pendidikan pesantren. Dalam hal ini, pesantren memiliki dua cara. Pertama, merevisi kurikulumnya dengan memasukkan banyak mata pelajaran dan ketrampilan umum. Namun pembaruan kurikulum ini tidak berjalan merata di semua pesantren, bahkan pesantren yang menerima pembaharuan tersebut hanya menerapkannya secara terbatas. Kedua, membuka kelembagaan dan fasilitas pendidikan bagi kepentingan pendidikan umum.

Masa kesulitan ekonomi pada saat itu mendorong pesantren melakukan pembaruan dalam hal pendidikan umum dan pengajaran ketrampilan, khususnya dalam bidang pertanian, seperti penanaman padi, kopi, tembakau, dan kelapa. Hal tersebut tentu saja diharapkan agar dapat memberikan bekal kepada santri untuk menunjang perekonomian. Hasil dari penjualan usaha pertanian tersebut kemudian digunakan untuk pembiayaan pesantren. Pesantren-pesantren tersebut di antaranya adalah Pesantren Tebuireng, Gontor, Denanyar, Tambakberas, dan Tegalrejo. Selain itu, pesantren juga mulai mendirikan serta mengembangkan koperasi guna membangkitkan minat kewirausahaan para santri pada saat itu. (Nurcholish Madjid, 1997)

Bertitik tolak pada pertumbuhan ekonomi, pemerintah Orde Baru juga menaruh harapan kepada pesantren untuk menjadi salah satu agen perubahan dan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, pesantren diharapkan tidak hanya memainkan fungsi-fungsi tradisionalnya saja berupa transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam, pemeliharaan tradisi Islam, dan reproduksi ulama. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga mengharapkan pendidikan pesantren mengarahkan kepada pengembangan pandangan dunia dan substansi pendidikan pesantren agar lebih responsif terhadap kebutuhan tantangan zaman. Misalnya, substansi ilmu kalam yang diajarkan di pesantren bukan lagi tentang Teologi Asy'ariyah atau Jabariyah, melainkan teologi yang kondusif bagi pembangunan, yakni teologi yang lebih mendorong bagi tumbuhnya prakarsa, usaha, dan etos kerja. Selain itu juga pembaruan pesantren diarahkan untuk refungsionalisasi pesantren sebagai salah satu pusat penting bagi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. (Nurcholish Madjid, 1997)

c. Era Pasca Reformasi

Era reformasi ditandai dengan tumbangannya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan presiden Soeharto pada tahun 1998. Pada era tersebut belum ditemukan konsep yang jelas, sehingga kondisi negara belum stabil. Ketidakstabilan keadaan tersebut terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, mulai dari politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pendidikan. Pada konteks ini perlu penataan dan kajian ulang seluruh aspek kehidupan dengan cara yang lebih demokratis, transparan, adil, jujur, manusiawi, dan modern. (Hamzah, 2014)

Pendidikan Islam (termasuk pondok pesantren) harus memberikan sumbangan untuk melahirkan manusia-manusia yang dapat mewujudkan masyarakat madani. Pendidikan pesantren berusaha memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani dan rohani, pengetahuan alam dan pengetahuan sosial-budaya, serta keseimbangan antara *continuitas* pengetahuan masa lalu dan masa kini.

Pendidikan Islam mendapatkan tantangan untuk memperjuangkan nasibnya melalui reformasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu menghadapi tantangan otonomi daerah.

Perhatian era reformasi terhadap pendidikan Islam termasuk pondok pesantren telah dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pasal 30 ayat 4 yang berbunyi: "Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis". Selain itu, terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Bab I pasal 1, ayat 4 berbunyi: "Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya".

#### d. Era Milenial dan Revolusi Industri 4.0

Penulis menyebut era milenial untuk mengganti istilah "saat ini" karena mengacu pada keadaan zaman. Era milenial dan revolusi industri 4.0 tentu sangat berpengaruh pada sebuah peradaban, termasuk peradaban ilmu pengetahuan. Era milenial beriringan dengan era revolusi industri 4.0. Pada era ini ditandai dengan keterbukaan arus informasi yang dapat diakses di manapun dan kapanpun. Sebuah informasi mampu menyebar ke seluruh dunia dan dalam waktu singkat. Hal tersebut rupanya berpengaruh juga pada pendidikan di pesantren.

Pada tanggal 24 September 2019, RUU Pesantren disahkan oleh DPR. Menurut Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama periode 2014-2019), lahirnya RUU Pesantren 2019 tersebut memberikan pengakuan dan independensi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan.

Ada lima poin utama RUU Pesantren yang disahkan DPR. Pertama, kitab kuning. RUU Pesantren menyetujui bahwa pesantren harus mengajarkan kitab kuning, sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 dan 3. Kedua, lembaga mandiri. Salah satu isi RUU Pesantren menerangkan bahwa pesantren merupakan lembaga mandiri, sebab pesantren memiliki ciri khas sebagai institusi yang menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Allah SWT. ketiga, kiai berpendidikan pesantren. Dalam pasal 5 RUU Pesantren, disebutkan bahwa pesantren harus memiliki kiai. Pada Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa kiai harus memiliki kompetensi ilmu agama berlatar belakang pendidikan pesantren. keempat, proses pembelajaran. RUU Pesantren mengesahkan ijazah kelulusan pesantren setara dengan lembaga formal lainnya dengan memenuhi jaminan mutu pendidikan. Kelima, mendapat dana abadi. RUU Pesantren menjelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 dan 2 bahwa pesantren akan mendapatkan dana abadi dari pemerintah.

Pesantren yang merupakan *blue print* pendidikan asli Indonesia sejak ratusan tahun lalu tidak lantas menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang jemu dan

terbelakang.(Maliki et al., 2022) Pada perkembangannya, pesantren tidak hanya mengajarkan kitab kuning semata. Pesantren pada saat ini justru menjadi lembaga pendidikan Islam yang inklusif dan mengikuti perkembangan zaman. Pesantren berupaya untuk selalu membuka ruang dialog dengan mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih relevan dan membawa masalah juga lebih sempurna dalam menjaga eksistensi pesantren. Hal tersebut selaras dengan kaidah *Al-Muhafadatu 'ala al-Qadimi al-Shalih wa al-Akhdhu bi al-Jadid al-Aslah*.

Gagasan modernisasi pesantren bertitik tolak dari modernisasi pendidikan Islam yang mempunyai akar-akar dalam gagasan tentang modernisasi pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan yaitu modernisasi pemikiran dan kelembagaan Islam yang merupakan sebuah syarat bagi kebangkitan kaum muslimin di masa modern.(Azra, 2000)

Era milenial yang diiringi dengan modernisasi dan globalisasi tidak lantas menenggelamkan tradisi pesantren begitu saja. Realita saat ini, kiai tidak hanya membacakan kitab kuning di depan santrinya secara tekstual saja, tapi juga dengan mengikuti perkembangan zaman dan kontekstual. Banyak kiai yang sudah menyandang gelar doktoral. Salah satunya adalah Kiai Husein Muhammad yang mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. Pemberian gelar tersebut dipromotori oleh tiga profesor, yakni Dr. KH. Nasaruddin Umar, Prof. Dr. Hj. Istibsyaroh, dan Prof. Dr. Imam Taufiq. Gelar Doktor Honoris Causa tersebut diberikan kepada KH. Husein Muhammad atas pemikirannya tentang Tafsir Gender. Penghargaan tersebut karena keberhasilannya dalam membedah tafsir secara paradigmatis terkait isu-isu keadilan sosial, terutama dalam bidang gender. Selain itu, Kiai Husein Muhammad juga lihai membuka pikiran masyarakat tentang fikih perempuan.

Selain itu, ada beberapa kiai lain yang juga menyandang gelar Doktor, di antaranya adalah Dr. KH. Idham Calid (Banjar, Kalimantan Selatan), Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad (Maliki & Ro'up, 2022), pakar Qira'at sab'ah Indonesia (Pengasuh dan Dewan Penasihat Pon.Pes. Darut Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat), Dr. KH. Musta'in Syafii (Pesantren Tebuireng, Jawa Timur), dan Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA., imam besar Masjid Itiqlal dan guru besar dalam bidang Tafsir pada Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Deretan nama kiai yang bergelar Doktor tersebut menggambarkan bahwa kiai pesantren memiliki kesadaran akan kebutuhan zaman. Kiai tidak hanya terpaku pada teks kitab semata, melainkan sudah mempertimbangkan banyak hal dan terbuka dalam mempertimbangkan kebutuhan pendidikan di pesantren sesuai dengan zamannya.

Pada era milenial ini pula, media sosial dimanfaatkan oleh anak muda dengan sangat masif. Gawai seolah-olah menjadi separuh nyawa dari hidup kebanyakan orang pada era milenial. Oleh karena itu, kehadiran media sosial mampu mereduksi peran sekolah, lembaga pendidikan Islam, serta peran keluarga dalam aktivitas proses mempelajari agama.(Maliki, 2018) Kekuatan media sosial juga melahirkan tokoh-tokoh baru yang sangat populer atau disebut "ustaz viral", seperti Hanan Attaki, Adi Hidayat, Abdus Shomad, Khalid Basalamah, dan Felix Siaw. Beberapa nama lain yang cukup dikenal di tempat tertentu adalah Ustaz Evie Effendi dan Jujun Junaedi di Jawa Barat dan Salim A. Fillah di Yogyakarta. Sedangkan untuk ustazah, di antaranya adalah Mamah Dedeh, Okki Setiana Dewi, dan Umi Pipik.(Bamualim et.all., 2018)

Perkembangan arus informasi yang sangat terbuka tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi lembaga pesantren selaku lembaga pendidikan Islam. Pesantren pada era milenial ini lantas mengembangkan kajian-kajiannya dari berbagai perspektif dengan tidak melupakan sanad keilmuan yang sudah terbangun dalam jejaring keilmuan. Beberapa pesantren pada era ini kemudian mengembangkan pola pendidikannya dengan lebih 'kekinian' dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Perhatikan saja, banyak pesantren yang

sudah memiliki kanal Youtube dan media sosial lainnya untuk turut berkontribusi dalam penyebaran konten bermuatan positif.

### 3. Dakwah Pesantren di Era Milenial dan Revolusi Industri 4.0

Dalam upaya menyebarkan ilmu keagamaan, pesantren tidak bisa lagi bersikukuh menggunakan cara-cara lama, seperti ceramah. Pada zaman dahulu, ceramah menjadi satu-satunya cara dalam menyampaikan materi dakwah dan pembelajaran. Ceramah tidak hanya memiliki segmen pendengar yang terbatas ruang dan waktu, tetapi juga terkait fleksibilitas akses terhadap materi dakwah.

Pada perkembangannya, media dakwah dan pendidikan yang berbasis teknologi mutlak diperlukan. Hal tersebut karena masyarakat milenial telah dapat mengakses ceramah, tausiyah dan materi dakwah secara mudah di manapun dan kapanpun. Media sosial perlahan telah banyak memberi pengaruh pemahaman agama terutama anak muda 'zaman now'. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pesantren dalam mengimbangi literatur keislaman yang tersebar melalui media sosial, terutama pesan-pesan yang mengandung bias-bias ideologi konservatif yang intoleran, liberal, dan radikal dengan memproduksi literatur keislaman yang moderat, humanis, dan toleran. (Auliya et al., 2019)

Kemudahan akses informasi melalui media sosial menjadi salah satu tantangan bagi kiai, santri, dan pesantren dalam menjaga jaringan keilmuan Islam agar tidak terputus. Dalam hal ini, santri, kiai, dan pesantren memiliki peran masing-masing dalam menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0. Santri harus pandai menyaring informasi yang diperoleh melalui jaringan internet. Kiai (mau tidak mau) harus berani berinovasi untuk menyebarkan ilmu melalui media sosial guna menangkalkan informasi (khususnya pembelajaran agama) yang tidak jelas sanad keilmuannya. Begitu juga dengan pesantren yang berperan sebagai tempat untuk mentransfer ilmu agama menggunakan sumber-sumber kitab ulama terdahulu, namun juga harus menyesuaikan dengan keadaan zaman.

Ada beberapa potensi yang dimiliki lembaga pendidikan Islam (khususnya pesantren) dalam menghadapi era milenial, antara lain terkait dengan sifat karakter pendidikan Islam yang holistik, komprehensif, progresif, responsif, pembentukan karakter santri, integralisme pendidikan Islam, dan pendidikan Islam dalam penyiapan generasi unggul.

Terkait dengan pembelajaran dalam perspektif pesantren, KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran di pesantren harus mampu membangun kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta aktif bertanya. Gus Dur sangat menolak sistem pembelajaran doktriner yang akhirnya akan membunuh daya eksplorasi peserta didik.

Aspek-aspek pendidikan pesantren yang menjadi sorotan Gus Dur di antaranya adalah melingkupi visi, misi, tujuan, kurikulum, manajemen, dan kepemimpinan pesantren yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman pada era globalisasi. Oleh sebab itu, kurikulum pesantren selain harus kontekstual dengan kebutuhan zaman, juga harus mampu merangsang daya intelektual kritis santri. Di sisi lain, pesantren tetap mampu mempertahankan identitas dirinya sebagai penjaga tradisi keilmuan klasik, tanpa harus larut sepenuhnya dengan modernisasi, serta mampu mengambil sesuatu yang dianggap manfaat dan positif untuk perkembangan pesantren.

Pesantren tetap eksis sejak awal berdiri hingga saat ini. Pesantren sebagai lembaga pendidikan selalu menawarkan pendidikan kepada masyarakat yang masih buta huruf. Pesantren menjadi institusi satu-satunya yang menjadi milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi besar. Kontribusi pesantren dalam sistem pendidikan di Indonesia, di antaranya adalah melestarikan dan melanjutkan sistem pendidikan rakyat serta mengubah sistem pendidikan aristokratis menjadi sistem pendidikan demokratis. (Jalaluddin, 1990)

## SIMPULAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli yang dimiliki nusantara. Melalui perjalanan sejarah panjangnya, sekolah-sekolah formal yang berkembang di Indonesia mengadopsi pola pendidikan yang dibangun oleh Belanda. Berbeda dengan pesantren yang memiliki sistem pembelajaran khas nusantara. Rukun pesantren di antaranya adalah adanya kiai, santri, kitab kuning, masjid atau musala, pondok atau asrama, dan sanad keilmuan.

Pesantren mengalami perubahan tiap zaman, namun pesantren tetap menjaga ciri khasnya berupa enam elemen yang menjadi rukun pesantren. Kitab kuning menjadi ciri khas pembelajaran di pesantren. Pada perkembangannya, kiai yang merupakan figur utama di pesantren menjadi semakin sentral dengan adanya arus globalisasi dan modernisasi yang terjadi.

Seorang kiai harus mampu menanggapi tantangan zaman. Konsep feminisme, gender, nasionalisme, HAM yang secara teoritis digagas oleh ilmuan Barat harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan kajian kitab-kitab pesantren yang sebenarnya sudah mencakup teori-teori kemanusiaan dan keadilan. Pada akhirnya banyak kiai yang mulai menyuarakan dan menyebarkan pesan positif melalui pengajarannya dengan mengutamakan konsep kemanusiaan dan keadilan.

Dakwah yang dilakukan oleh pesantren pun sekarang tidak hanya dengan metode ceramah saja, melainkan sudah memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan konten positif dan sebagai upaya penangkal konten negatif dan ekstrimis. Beberapa pesantren di Indonesia sudah memiliki berbagai perangkat media sosial. Begitu pun kiai-kiai pesantren sudah turut menyebarkan pengajarannya melalui media sosial yang lebih mudah diakses oleh semua orang tanpa terbatas tempat dan waktu. Kitab dan hadis yang selama ini identik dengan maskulinitas, kini sudah mengalami perkembangan penafsiran yang lebih mendalam dan kontekstual sehingga tidak terkesan misoginis, melainkan adil dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “Kurikulum Pesantren dalam Perspektif Gus Dur; Suatu Kajian Epistemologis”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4, No. 2.
- Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara*, Bandung: Mizan, 2002.
- \_\_\_\_\_, “Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis”, dalam J. Burhanuddin, *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, ed. D. Afrianty, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000.
- Bamualim, Chaider, dkk, *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2018.
- Haedari, HM Amin, dkk, *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*, Cet. I, Jakarta: IRD Press, 2004.
- Hamzah, Wahib, “Perkembangan Pesantren di Indonesia (Era Orde Lama, Orde Baru, Reformasi)”, *Jurnal Syamil*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Nuriz, M. Afthon Lubbi, “Generasi Muda Milenial dan Masjid di Era Digital”, dalam Abdul Wahid, dkk, *Masjid di Era Milenial: Arab Baru Literasi Keagamaan*, ed. Jajang Jahroni dan Irfan Abubakar, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2019.
- Pilcher, Jane, “Mannheim’s Sociology of Generations: an Undervalued Legacy”, *BJS*, Vol. 45, No. 3, 1994.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif*, Cet. I, Bandung: Mizan, 2002.

- Steenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Cet. I, terj. Karel Steenbrink dan Abdurrahman, Jakarta: Dharma Aksara Perkasa, 1986.
- Suharto, *Marketing Pendidikan: Menata Ulang PTKI Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*, ed. Z. Abidin, Yogyakarta: PT. LKiS, 2016.
- Sutopo, Hoedi Prasetyo dan Wahyudi, “Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset”, *Jurnal Teknik Industri*, Vo. 13, No. 1, 2018.
- Theko, “Meet Generation Alpha”, dalam <http://www.fluxtrends.com/meet-generation-alpha>. Diakses pada 12 April 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 47 Tahun 2008, Cet. II, Bandung: Citra Umbara, 2009.
- Yasmin, Putri, “5 Poin RUU Pesantren yang Disahkan DPR Hari ini”, dalam <https://m.detik.com/news/berita/d-4720447/5-poin-yang-disahkan-dpr-hari-ini>. Diakses pada 25 Januari 2020.
- Auliya, H., Abubakar, H. S., & Maliki, N. (2019). Pesantren and Tolerance: Looking at the Faces of Santri Tolerance in Babakan Ciwaringin Cirebon. *JURNAL PENELITIAN; Volume 16 Nomor 2 2019*. <https://doi.org/10.28918/jupe.v16i2.2276>
- Burhanuddin, J. (2006). Pendidikan Islam Indonesia dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-Historis. In D. Afrianty (Ed.), *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Maliki, N. (2018). Generasi Rabbani. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 10(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i1.70>
- Maliki, N. (2023). *Pesantren di Era Disrupsi*. Maghza.
- Maliki, N., Auliya, H., Rubiyad, A., Lutfi, L., & Yusuf, M. (2022). *Islamic Boarding School Transformation in the Era of Disruption ( Case Study of Bina Insan Mulia Islamic Boarding School in Cirebon )*. 1(2), 125–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.51773/icobba.v1i2.69>
- Maliki, N., & Ro’up, A. (2022). Metode Membaca dan Menghapal Al-Qur’an Perspektif KH. Ahsin Sakho Muhammad. *Tsaqafatuna*, 4(2), 200–213. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v4i2.175>
- Nurcholish Madjid. (1997). *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Paramadina.
- Suharto. (2016). *Marketing Pendidikan: Menata Ulang PTKI Menghadapi Pasar Bebas ASEAN*. LKiS.
- Zamakhsyari Dhofier. (2011). *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. LP3ES.